



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MELAKSANAKAN
PENDIDIKAN POLITIK UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF
PEMILIH PEMULA PADA PILKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada Prodi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Muhammad Adeputera Hemas

3301413042

JURUSAN PENDIDIKAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

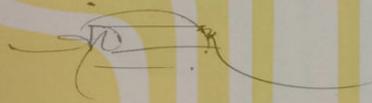
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes, pada:

Hari : 9 Oktober 2019

Tanggal :

Pembimbing I



Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP.196406081988031001

Pembimbing II

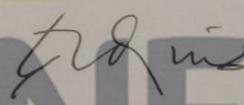


Martien Hema Susanti, S.Sos, M.Si.

NIP.197303312005012001

Mengetahui/Mengesahkan.

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES
Drs. Tijan, M.Si
NIP.196211201987021001

ii
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Oktober 2019



Penguji I

Dr. Sos. Puji Lestari S.Pd., M.Si.

NIP. 197707152001122008

Penguji II

Dr. Eko Handoyo, M.Si

NIP.196406081988031001

Penguji III

Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si.

NIP.197303312005012001

UNNES

Mengetahui,

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



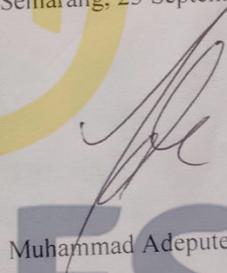
Dr. Moh. Solehatul Mustafa, M.A.

NIP. 19630802198831001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri bukan jiplakan dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 23 September 2019


Muhammad Adeputera Hemas

NIM. 3301413042

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi jalan kemudahan orang lain. Itu saja sebenarnya yang harus kita syukuri.
2. Tetaplah menjadi baik. Jika beruntung kamu akan menemukan orang baik, jika tidak kamu akan ditemukan orang baik.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Arief Suaedi dan Ibu Dewi Puspitasari yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat nasehat dan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya.
3. Dosen penguji utama yang telah memberikan masukan pada skripsi saya.
4. Dosen PKn yang telah memberikan ilmu kepada saya.
5. Teruntuk Almamaterku Universitas Negeri Semarang.



PRAKATA

Segala puji dan syukur senantiasa penulis menghaturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal” dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) di Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang mengizinkan penulis untuk menempuh studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustafa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh di Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memungkinkan penulis melakukan penelitian ini.
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

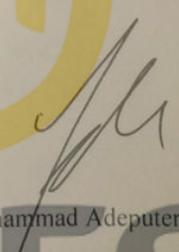
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan serta bantuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.

7. Ibu Hevy Indah Oktaria, SE. , selaku Kepala Komisi Pemilihan Umum yang telah memberikan izin dalam penelitian ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dan menyelenggarakan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT, dan saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangat kami harapkan demi peningkatan manfaat skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan berguna bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 September 2019



Muhammad Adeputera Hemas

NIM. 3301413042

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Hemas, Muhammad Adeputera. 2017 . *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: . Pembimbing II: . halaman.

Kata kunci : Peran KPU, Pendidikan Politik, Partisipasi Aktif.

Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Kendal terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik; (2) Mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) Peran KPU dalam melaksanakan pendidikan politik; (2) Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu dengan melakukan program sosialisasi. Bentuk pendidikan politik KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah- sekolah.

Saran yang diberikan penulis yaitu bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas sejak dini. Bagi Komisi Pemilihan Umum, diharapkan untuk selalu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik dengan materi yang lebih inovatif. Bagi Masyarakat, diharapkan agar masyarakat selalu mengikuti isu dan perkembangan politik.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
BAB II - TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Peranan KPU Kabupaten Kendal	10
a. Pengertian Peranan	10
b. Pengertian Komisi Pemilihan Umum	12
c. Visi dan Misi KPU	16

d. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum	17
2. Pendidikan Politik	19
a. Pengertian Pendidikan Politik	19
b. Tujuan Pendidikan Politik	23
3. Aspek Pendidikan Politik	26
4. Bentuk Pendidikan Politik	26
5. Partisipasi Politik	28
6. Pilkada	40
7. Pemilih Pemula	41
C. Kerangka Berpikir	52
BAB III - METODE PENELITIAN	54
A. Latar Penelitian	54
B. Fokus Penelitian	54
C. Sumber Data	55
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	56
E. Uji Validitas Data	57
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
1. Kondisi Geografis Kabupaten Kendal	61
2. Profil KPU Kabupaten Kendal	62
3. Peran KPU Kabupaten Kendal	67
4. Bentuk Pendidikan Politik	73
B. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	81

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian	88
Lampiran 2 Pedoman Wawancara dan Observas.....	96
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara	99
Lampiran 4 Dokumentasi	115
Lampiran 5 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial .	116
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian	117
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	118



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin (Surbakti, 2010:150).

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari

masyarakat itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal (Alfian,1978:235).

Dalam praktiknya pendidikan politik dapat dilakukan oleh berbagai agen. Seperti agen-agen yang diungkapkan Afan Gaffar (2002: 102) yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagaimedia elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio.

Sebenarnya pemilih pemula secara psikologis juga rentan. Perilaku memilih mereka masih belum rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal. Dalam penelitian Jennings dan Nieni (1990) terungkap bahwa anak-anak pada usia SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orangtua mereka. Ditambah lagi kecenderungan para remaja yang biasanya mudah terpengaruh dengan teman sebayanya. *Peer group* akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan . Menurut Ahmadi (dalam Mukti Sitompul, 2005: 2).

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya.

Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut keberlangsungan pemilih pemula.

Partisipasi Masyarakat Kendal dalam keikutsertaan di ajang Pilkada cukup rendah. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2015 lalu, hanya 67,42 % warga Kendal yang menggunakan hak suara mereka. Sedangkan untuk pemilih pemula yang turut berpartisipasi hanya 26,48%.

Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 13 yang menyatakan : “Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten atau Kota kepada masyarakat ”.

Dalam penyusunan skripsi ini , penulis sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fatkhul Damanhury dalam penelitiannya yang berjudul ”Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Sleman pada Tahun 2011-2012” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Disamping itu juga untuk mengetahui peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada tahun 2011-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang KPU Kabupaten Sleman melaksanakan pendidikan politik adalah sebagai pelaksanaan amanat fungsi

sosialisasi politik dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pemilih pemula dijadikan sasaran program pendidikan politik karena, (a) jumlah pemilih pemula cukup banyak yaitu sekitar 20%, sehingga pemilih pemula perlu diberikan kesadaran agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. (b) Untuk menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas sama dengan tipe pemilih rasional yaitu pemilih yang memilih dengan pertimbangan rasionalitas, berdasarkan visi dan misi, rekam jejak dan perogram-program yang ditawarkan. (c) untuk membentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkena residu politik, seperti *money politic* dan kampanye hitam.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti memilih judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Kendal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal.
2. Mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan KPU dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat yaitu manfaat penelitian yang bersifat teoretis dan manfaat penelitian yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini menjelaskan mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik dalam perspektif teori partisipasi politik menurut Faulks (dalam Eko Handoyo 2016).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca

Menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk

meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula muda di Kabupaten Kendal.

b. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

E. Batasan Istilah

Dalam upaya memudahkan dan menghindari salah pengertian terhadap penelitian ini, diberikan pengertian dan batasan masing-masing istilah, yaitu:

1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2012:212).

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga - lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. KPU dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Kendal.

3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beraneka ragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politik serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan (Kartono, 1989:3).

Pendidikan politik adalah usaha sadar yang dilakukan secara sengaja dan terorganisir yang dilaksanakan oleh orang tua, lembaga formal maupun informal, yang diberikan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk memberikan pengetahuan dan menyadarkan generasi muda mengenai pentingnya ikut serta secara aktif dalam berpolitik.

Pendidikan politik dalam penelitian ini dilakukan melalui sosialisasi politik ke sekolah-sekolah agar pemilih pemula dapat ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Kendal.

4. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik seperti pemegang jabatan publik atau pejabat partai, menjadi kandidat untuk suatu jabatan, memberikan dana politik, mengikuti atau menjadi anggota politik, menjadi aktivis partai dan pekerja kampanye atau aktivis masyarakat (Handoyo, 2010:230).

Partisipasi aktif dalam penelitian ini difokuskan pada pemilih pemula sebagai warga negara agar dapat menggunakan hak politiknya

pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kendal karena pemilih pemula memiliki daya kritis dalam menentukan hasil pemilihan.

5. Pemilih Pemula

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teoritis

A. Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal

1. Pengertian Peranan

Menurut Soekanto (2012:212), Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan, terdapat dua macam harapan, yaitu: 1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, 2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibannya.

Sedangkan menurut Sarwono (2014:215) teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari

dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Selain itu, menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2014: 215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam perilaku, serta kaitan antara orang dan perilaku.

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.

Ahmadi (2009:106) membedakan peranan menjadi dua yaitu peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Peranan Perseorangan (Individual) yaitu pengharapan-pengharapan tingkah laku didalam

status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dari individu-individu itu sendiri.

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum “peran” dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Beberapa peranan dan kewenangan KPU yaitu menetapkan partai yang berhak ikut pemilu, menetapkan caleg yang akan ikut pemilu, menetapkan hasil pemilu, menetapkan tata cara pemilu, menjadwalkan pemilu.

2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD

1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikannya lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salahsatunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

- (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
- (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- (6) Pengawas Pemilu Lapangan

- (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri
- (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
- (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- (10) Panitia pemungutan Suara (PPS)
- (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- (13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 KPU Daerah sebagai penyelenggara pemilihan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya pada masyarakat.
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepat waktu.

3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi (www.kpu.go.id), yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

4. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disanadiatur bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas,

wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011

Pasal 8, yaitu:

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti: Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

B. Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud, menurut undang-undang ini dilaksanakan selama dua puluh satu hari, dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Konsep pendidikan politik terdiri dari dua kata kunci pokok yaitu pendidikan dan politik, pendidikan erat kaitannya dengan politik, hubungan pendidikan dengan politik sangat empiris dan sudah berlangsung lama. Pendidikan dalam hal ini adalah proses yang dilakukan secara sengaja untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik agar mereka memiliki kemampuan dalam menanggapi lingkungan secara positif atau melakukan perubahan (pengetahuan, sikap dan perilaku) yang bermakna bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara

beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu (Budiardjo, 2008:15).

Pendidikan politik diartikan pula sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi, yaitu berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan dan realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal (Alfian, 1978:235). Pendidikan politik berkaitan erat dengan sosialisasi politik, hal ini dikarenakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik sama-sama memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik baik secara sadar atau tidak sadar yang berujung pada sikap mengajak dan memberikan pengetahuan.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar mengenai pentingnya ikut dalam kegiatan politik dan berkepribadian politik, agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab.

Surbakti (2010:150) pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik, pendidikan politik diberikan kepada peserta didik dalam rangka untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma dan simbol politik yang dianggap baik dan ideal. Hal ini berarti terjadi interaksi secara langsung antara pemberi dan penerima pendidikan politik mengenai sistem politik yang berlaku dalam suatu negara karena dianggap ideal dan baik.

Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politik serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan (Kartono, 1989:3). Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, pendidikan semacam ini jelas tidak menonjolkan proses kultivasi (penanaman nilai yang akan berpengaruh pada khalayak) individu sebagai “pribadi terisolasi” dalam ruang hampa akan tetapi lebih menekankan realisasi diri manusia dalam satu konteks politik.

Pendidikan politik menurut Ruslan (dalam Handoyo 2010) sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik

formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatan warga negara sehingga menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif dan ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

Pendidikan politik juga bisa diartikan sebagai bentuk pendidikan intensional dan sistematis untuk mempengaruhi individu, agar lebih efektif lagi dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan politik, dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam setiap kegiatan politiknya. Maka yang diperlukan bukan hanya melancarkan proses-proses politik saja, akan tetapi justru ada kegiatan politik warganegara dan pertanggungjawab politiknya untuk ikut mengatur masyarakat dan negara atau pemerintahan, menuju kehidupan sejahtera (Sukarno).

Jadi, pendidikan politik dimaknai sebagai suatu usaha sadar dan terencana dari seseorang untuk menyadarkan dan memberikan pengetahuan kepada orang lain yaitu dari orang dewasa kepada generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantapkan orientasinya terhadap politik. Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan ini diharapkan para

generasi muda mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan perpolitikan dalam bangsa dan negara sehingga muncullah kader-kader muda yang lebih kompeten dalam memperjuangkan politik bangsa secara demokratis dan mampu bertanggung jawab secara etis dengan dimilikinya kesadaran politik yang dimiliki para partisipan muda tersebut.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik menurut Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda adalah menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar menjadi sadar akan politik dan lambat laun akan mengembangkan bakat dan minat seseorang untuk ikut serta berpartisipasi di dunia politik dan mampu bersaing secara positif, kritis, kreatif serta bertanggung jawab dan berpedoman penuh pada Pancasila dan UUD 1945.

“Pendidikan politik berkaitan erat dengan pendidikan nasional mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, membuat rakyat (individu, klien, anak didik, dan warga masyarakat) mampu memahami situasi sosial politik yang penuh tanggung jawab dan kritis terhadap konflik yang terjadi. Kedua, menampilkan peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara dengan mengembangkan

semua bakat, potensi dan kemampuannya (pengetahuan, sikap, wawasan dan keterampilan) agar ia dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan bangsa dan negara. Khusus bagi generasi muda, tujuan pendidikan politik bagi generasi muda adalah: (1) membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik dan sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam sejumlah sifat watak atau karakteristik kepribadian Indonesia” (Kartono, 1989).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan Pancasila.

Pendidikan politik dewasa ini sangat didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses informasi, hal ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dunia politik bahkan para aktivis partai politik sehingga kecurangan-kecurangan dan elite politik tidak dapat menggunakan kekuasaannya dengan bebas dan memonopoli para kaum

muda yang masih rentan terhadap sikap pragmatisme dan materialistis (Firmanzah, 2007:49), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini semakin memudahkan seseorang untuk mengakses informasi politik secara detail dari media massa ataupun media elektronik yang dapat di terima oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan dan cacat hukum dari kegiatan politik.

Tujuan pendidikan politik pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan kepada individu ataupun kelompok mengenai betapa pentingnya sebagai anggota warga negara untuk ikut serta dalam penyusunan pemerintahan dan aktif dalam berbagai kehidupan politik yang ada melalui hal-hal kecil, misalnya dengan menjadi anggota partai (kader), ikut serta memberikan suara dalam kegiatan pemilihan umum, ataupun menjadi peserta kampanye suatu partai politik. Pendidikan politik dapat membentuk warga negara yang mempunyai sikap kritis, aktif dan mampu melaksanakan aktifitas-aktifitas politik secara benar dan terhindar dari kecurangan-kecurangan aktifitas politik.

3. Aspek Pendidikan Politik

a. Aspek Kognitif

Aspek kognitif bertujuan untuk membangun pengetahuan politik warga negara terhadap konsep-konsep dasar politik tertentu sangat penting untuk dibangun karena dengan ini kesadaran politik yang

kritis akan terbangun sebagai salah satu syarat penting bagi suatu partisipasi warga yang otonom.

b. Aspek Afektif

Proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada seorang warga negara, nilai-nilai politik yang disampaikan dalam pendidikan politik ini adalah nilai yang mengandung unsur demokrasi.

c. Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik pendidikan politik mencakup kecakapan-kecakapan warga negara yang meliputi kecakapan intelektual (kecakapan berpikir kritis) dan partisipasi yang terkait.

4. Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang diberikan kepada para generasi muda dapat dilaksanakan melalui beragam cara ada yang secara langsung ataupun tidak langsung, media yang digunakan secara langsung misalnya diskusi terbuka, pelatihan, pengajian ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara langsung bertatap muka sedangkan pendidikan politik yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui spanduk, leaflet ataupun selebaran. Bentuk dan cara untuk mensosialisasikan pendidikan politik terhadap para kaum muda dalam suatu daerah dilakukan dengan cara :

a) Pengajaran pendidikan politik yang benar

Pengajaran pendidikan politik yang benar dapat dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga akan memperoleh pengetahuan

mengenai politik yang sesungguhnya dan akan terpengaruh untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu keadaan politik tertentu.

b) Diskusi

Diskusi dapat dijadikan media para anggota untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pendidikan politik ataupun situasi politik terkini sehingga dapat mengevaluasi partai politiknya dan menentukan strategi untuk memenangkan dan merancang kemenangan partai politik.

c) Pelatihan kepemimpinan

Pelatihan kepada kaum muda untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu bertanggungjawab dan dapat berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah serta dapat mengeluarkan pendapat secara etis dan profesional dalam konflik politik yang terjadi.

d) Pendidikan politik melalui bidang keolahragaan

Olahraga merupakan salah satu cabang kegiatan yang paling disukai para kaum muda, karena dengan berolahraga seseorang akan bebas mengekspresikan dirinya melalui pertandingan-pertandingan yang diadakan.

e) Publikasi dan Komunikasi massa

Salah satu alternatif metode yang memungkinkan sikap dan garis partai dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga peristiwa, momentum dan informasi yang penting dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat (Dhakidae, 2004:106).

C. Partisipasi Politik

1. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah keikutsertaan setiap individu dalam suatu kegiatan politik yaitu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara melalui pemilihan umum, menjadi anggota atau kader partai politik ataupun hanya menjadi simpatisan yang fanatik terhadap suatu partai politik yang ada di Indonesia, karena dengan berpartisipasi seseorang akan menjadi warga negara yang sesungguhnya dengan ikut serta dalam pemerintahan. Kajian penelitian ini di fokuskan pada kaum muda dalam keikutsertaannya.

Era modern ini cita-cita partisipasi politik semakin mengkrystal dan bahkan menjadi bagian dari konsep pembangunan politik maupun modernisasi. Weiner dalam Kamarudin, ada dua faktor pendorong bagi menguatnya partisipasi politik. Pertama, tumbuhnya angkatan kerja perkotaan yang bekerja di sektor industri yang mendorong organisasi buruh. Kedua, pertumbuhan komunikasi massa karena perkembangan penduduk, transportasi, komunikasi antara pusat-pusat kota dan daerah terbelakang, penyebaran surat kabar, penggunaan radio dan sebagainya (Kamarudin, 2003:168). Kedua faktor tersebut ikut berpengaruh dalam kegiatan partisipasi aktif setiap individu untuk terjun langsung dalam politik, karena partisipai seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh suatu partai politik tertentu tetapi lingkungan juga berpengaruh.

Pengertian partisipasi politik oleh Faulks bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini mencakup keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik ini merupakan proses aktif, dimana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan (pressure group), namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi. Huntington dan Nelson mendefinisikan partisipasi politik tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh pelakunya sendiri yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Handoyo, 2010:228). Seseorang yang turut serta partisipasi tidak harus menjadi kader dalam partai politik tetapi menjadi simpatisan suatu partai politik dapat disebut sebagai partisipasi aktif karena ia turut serta dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan.

Kategori partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel dalam Handoyo (2010), dibedakan menjadi empat kategori, yaitu :

- a. Apatitis adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik yang sering disebut dengan golongan putih atau golput.
- b. Spektator adalah orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

c. Gladiator adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti pemegang jabatan publik atau pejabat partai, menjadi kandidat untuk suatu jabatan, menjadi aktivis partai, pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.

d. Pengkritik adalah berupa partisipasi yang tidak konvensional. Kelompok ini berada diluar pemerintahan, yang perannya adalah memberikan kritik terhadap pemerintah yang berkuasa.

Pola partisipasi politik ditunjukkan melalui kadar tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan politik, pada dasarnya ditentukan oleh setidak-tidaknya tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan sistem (Kamarudin, 2003:95). Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang tersebut sangat kompleks karena seseorang yang mempunyai pendidikan rendah akan berpikir apatis dan tidak berpikir ke depan yang penting kebutuhannya tercukupi dan sistem yang terbuka sangat berpengaruh pada partisipasi seseorang karena hal tersebut tidak berbelit-belit.

Definisi partisipasi politik menurut (Surbakti, 2010:151) kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Melalui pemilihan

umum seseorang dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik untuk memilih wakil rakyat yang mampu menyalurkan aspirasinya.

Menurut Miriam Budiardjo (2008) partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dsb. Demikian halnya partisipasi politik yang diungkapkan oleh Herbert McClosky, Norman H. Nie dan Sidney Verba bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela setiap warga negara untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat dan kebijakan-kebijakan yang diambil mereka.

Menurut Weiner (dalam Eko Handoyo 2016 : 215) partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih strategi umum atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat regional maupun nasional.

Ali Sa'ad (dalam Ruslan 2000:99) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kontribusi akan keikutsertaan warga dalam masalah-masalah

politik di lingkup masyarakatnya, dengan mendukung atau menolak, serta membantu atau melawan dan seterusnya.

Faulks (2010:226) memberi batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini mencakupi keterlibatan warganegara dalam pembuatan keputusan politik, langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik ini merupakan proses aktif, di mana seseorang dapat saja menjadi anggota sebuah partai atau kelompok penekan (pressure group), namun tidak memainkan peran aktif dalam organisasi.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994:6), memahami partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Axford (dalam Eko Handoyo 2016 : 216) mengartikan partisipasi politik sebagai tindakan-tindakan dengan mana para individu mengambil bagian dalam proses politik. Axford (2002:121) juga mendefinisikan partisipasi politik sebagai suatu tindakan sukarela melalui mana orang berusaha memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik.

Surbakti (2007:140) mengartikan partisipasi politik sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.

Dari berbagai definisi partisipasi politik tersebut, dapat dikemukakan unsur-unsur partisipasi politik. Pertama, adanya kegiatan yang disengaja dilakukan oleh warga negara biasa. Kedua, kegiatan tersebut bersifat sukarela, tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapa pun. Ketiga, kegiatan tersebut ditujukan kepada pemerintah. Keempat, kegiatan tersebut berkaitan dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau badan-badan publik. Kelima, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memengaruhi pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan atau keputusan politik. Sesuai dengan karakteristik demokrasi, gerakan ke arah partisipasi berkembang luas. Menurut Myron Weiner terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu:

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru

sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

- d. Konflik yang timbul antar kelompok pemimpin dan timbul konflik antar elit, maka yang dicari adalah dukungan rakyat, serta perjuangan kelas pemenang melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Dengan demikian, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh para penyelenggara negara melalui berbagai tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, bergabung dengan kelompok kepentingan atau lembaga politik, mencari kandidat dan/atau mencalonkan diri sebagai kandidat penyelenggara negara, menjalin komunikasi dengan pejabat negara, demonstrasi, kampanye, dan sebagainya.

2. Indikator Partisipasi Politik Aktif

Indikator yang mendasari tingkat partisipasi partai politik masyarakat adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Partisipasi

secara aktif dapat dilakukan dengan kegiatan yang tidak banyak menyita waktu misalnya memberikan suara dalam pemilihan umum, sedangkan partisipasi politik aktif secara penuh yaitu ikut serta dalam kegiatan politik misalnya menjadi pimpinan partai, anggota partai politik, ataupun menjadi kader dalam suatu partai politik.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Rush and Althof, (1990:124) sebagai berikut: (1) menduduki jabatan politik atau administratif, (2) mencari jabatan politik atau administratif, (3) keanggotaan aktif suatu organisasi politik, (4) keanggotaan pasif suatu organisasi politik, (5) keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political), (6) keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political), (7) partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya, (8) partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik, (9) voting (pemberian suara), (10) apati total.

Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut merupakan tingkatan dari bentuk partisipasi paling terendah hingga puncak partisipasi seseorang yaitu dengan menduduki jabatan politik atau administratif, partisipasi seseorang dalam kegiatan politik tidak harus melewati seluruh tingkatan partisipasi tersebut karena partisipasi seseorang tidak dapat dipaksakan oleh apapun karena kita menganut asas demokrasi, jadi seseorang dapat bebas memilih kegiatan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik.

Partisipasi aktif (berbuat nyata) mempunyai pengaruh dan kekuatan, sebab bisa ikut pula dalam pengawasan aktivitas mengatur masyarakat dan negara (Kartono, 1989:76). Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut dapat dijadikan sebagai indikator partisipasi politik seseorang, ada yang berbentuk partisipasi aktif ataupun partisipasi pasif.

Tujuan partisipasi politik adalah untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatannya harus ditujukan dan mempunyai dampak terhadap pusat-pusat dimana keputusan itu diambil. Menganalisis tingkat partisipasi seseorang kita perlu membedakan dua sub dimensi (a) lingkup, atau proporsi dari suatu kategori penduduk yang diberi definisi, yang melibatkan diri dalam kegiatan partisipasi yang khusus, dan (b) intensitas, atau ukuran, lamanya, dan artinya penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

3. Teori Partisipasi Politik

Faulks (2010) mengemukakan tiga teori partisipasi politik, yaitu teori elitisme demokratis, teori pilihan rasional, dan teori partisipasi. Schumpeter sebagai penganjur teori elitisme demokratis, mengemukakan bahwa pemimpin yang berwawasan, yang mendapatkan persetujuan melalui partisipasi minimal massa, merupakan cara terbaik untuk memelihara ketertiban. Inilah yang oleh Schumpeter disebut elitisme demokratis yang telah terlembagakan dalam sistem pemerintahan representatif pada periode pasca perang. Schumpeter yakin bahwa massa itu bodoh dan apatis, sehingga

partisipasi mereka justru akan merusak stabilitas. Kewarganegaraan yang terlalu aktif, menurut Schumpeter, akan menghasilkan keputusan politik yang kurang baik, karena mereka mudah dimanipulasi oleh para ideolog yang hendak merobohkan sistem. Jika ini terjadi, pemerintahan yang bijak (prudent) mustahil dapat dicapai. Itulah sebabnya, pembuatan kebijakan sebaiknya diserahkan kepada mereka yang secara intelektual mampu. Elit boleh memanipulasi secara halus demi menetralisasi akibat buruk dari massa. Benarlah apa yang dikatakan Lippman, "memberikan rakyat bukan apa yang diinginkan oleh mereka, melainkan apa yang akan belajar diinginkan oleh mereka".

Pandangan minimalis terhadap partisipasi politik tidak hanya disuarakan oleh teori elitis demokratis. Teori pilihan rasional juga memiliki keyakinan serupa. Berbeda dengan pandangan kaum elitis demokratis, penganut pilihan rasional, seperti halnya Olson dan Downs berpendapat bahwa tidak adanya kemauan mayoritas untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan, melainkan karena rasionalitas mereka (Faulks 2010:22). Para individu rasional untuk memutuskan akan berpartisipasi politik atau tidak, akan mengajukan pertanyaan, "apa yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya". Teori pilihan rasional juga berkeyakinan bahwa individu yang rasional dan mengutamakan kepentingan sendiri, tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum atau kelompok. Implikasinya, gerakan

politik akan dipimpin oleh orang yang secara pribadi memperoleh keuntungan, karena terlibat. Bagi kaum elit politik, partisipasi politik dipandang rasional, jika karenanya mereka memperoleh kekuasaan dan prestise. Mobilisasi para partisipan lain akan sangat bergantung pada seberapa kuat usaha meyakinkan mereka bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan langsung dari partisipasi ini dan keuntungan tersebut melebihi biaya yang telah dikeluarkan. Dalam kaitan dengan teori kedua ini, ada jenis partisipasi yang lebih menyebar ketimbang bentuk partisipasi lainnya. Misalnya, individu akan lebih mudah dibujuk untuk memberikan suara dalam pemilihan umum (voting), yaitu suatu kegiatan yang relatif tanpa biaya, dibandingkan menghabiskan waktu berjam-jam berkampanye untuk partai politik tertentu.

Teori elitis demokratis dan pilihan rasional merupakan teori partisipasi kaum instrumental, karena partisipasi politik dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih penting. Berbeda dengan kedua teori tersebut, teori partisipasi demokrasi memandang keterlibatan politik bersifat developmental, artinya partisipasi lebih dari sekadar metode pemerintahan, tetapi ia memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menyatukan masyarakat sipil dan mendidik warga negara tentang seni pemerintahan (Faulks 2010:230). Prinsip umum teori partisipasi demokrasi adalah (1) memaksimalkan jumlah dan intensitas partisipasi oleh semua anggota masyarakat sipil, (2)

memperluas bidang kehidupan sosial yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Teori partisipasi berkeyakinan bahwa aktivisme politik tidak hanya memberi keuntungan bagi partisipan, tetapi juga menjadi landasan yang lebih kokoh bagi stabilitas politik yang diusahakan para elit politik. Dalam kaitan ini, Barber sebagaimana dikutip Faulks (2010), menawarkan visi tentang demokrasi yang kuat, di mana politik adalah sesuatu yang dilakukan oleh-bukannya untuk-warga negara. Hal ini berarti harus memperkuat pemerintahan lokal, memperluas praktik demokrasi ke dalam institusi-institusi masyarakat sipil, serta meningkatkan peluang penggunaan referendum nasional dan inisiatif kebijakan yang dipelopori oleh warga negara. Dalam demokrasi yang kuat, sebagaimana diyakini Barber, partisipasi tidak dimaknai sebagai sekadar mempertahankan kepentingan, melainkan merupakan suatu proses politik yang matang, yang tidak mengklaim suatu kebenaran melebihi apa yang disetujui secara konsensus oleh warga negara. Perluasan tanggung jawab keputusan kepada setiap orang, menyebabkan demokrasi lebih berhasil dipertahankan terhadap musuhmusuhnya, karena setiap warga negara akan berkepentingan untuk mempertahankannya. Hal ini akan mengembangkan kompetensi politik pada diri individu warga negara dan karenanya dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Implikasi lebih jauh adalah empati antarwarga negara akan terpupuk, konflik antar

kelompok sosial dapat diselesaikan secara terbuka, dan budaya politik partisipasi akan berkembang lebih baik.

D. PILKADA

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis

E. Pemilih Pemula

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Sedangkan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. M. Rusli Karim (1991:32) mengemukakan bahwa kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan salah satu kelompok yang sulit didekati partai politik ataupun kontestan Pemilu. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Suhartono (2009:6), pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada

hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Seringkali apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-pilihan dalam pemilu atau pilkada, membuat pemilih pemula sering tidak berpikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun terlepas dari semua itu, keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini akan dapat merasakan keuntungannya, sebaliknya

ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target-target suara pemilihan yang ingin dicapai.

F. Kajian-kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti, pastinya peneliti memerlukan pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang relevan yang dibuat sebelum penelitian ini ditulis. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Maria Desti Rita (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung*”. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan peranan KPU dalam pemberian informasi, penyediaan aksesibilitas, dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas sesuai PKPU No 5 Tahun 2015. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berkaitan dengan peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya.
2. Muhammad Eky Malindo Putra (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Bintan Tahun 2010*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi objektif peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan peran KPU dalam PILKADA. Perbedaannya adalah terletak pada obyeknya.

3. Maslekeh Pratama Putri (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur”*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam sosialisasi pemilu sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2014 di Kalimantan Timur. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya saling berkaitan dengan peran komisi pemilihan umum, sedangkan perbedaannya terletak pada obyeknya.
4. Muhammad Fatkhul Damanhury dalam penelitiannya yang berjudul *“Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Sleman Pada Tahun 2011-2012”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Persamaan dalam penelitian ini saling berkaitan dengan peran komisi pemilihan umum dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Perbedaannya adalah terletak pada tujuannya.
5. Muh Imam Adli Aqil (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014”*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden Tahun 2014 dan juga untuk mengetahui faktor

pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014. Persamaan dari penelitian ini adalah, peran KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sedangkan perbedaannya terletak pada sasaran pemilih KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik.

6. Randy Helnal Dinata (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015*" Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk menganalisis penyebab naiknya partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015 dan untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2015. Persamaan dari penelitian ini adalah tujuan objek penelitiannya yaitu sama-sama tentang partisipasi pemilih pemula. Sedangkan perbedaannya adalah tidak ada tujuan untuk peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam mengikuti pemilihan umum.
7. Reidy Kinanti Adati (2014). "*Peranan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014*". Tujuan dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu untuk terus melakukan sosialisasi kearah pencerdasan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kesadaran politik mereka. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah saling

berkaitan tentang peranan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik. Sedangkan perbedaannya yaitu partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif.

8. Tia Subekti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Study Turn Of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu focus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya melihat *turn of voter* dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini yaitu partisipasi politik dalam Pilkada. Sedangkan perbedaannya fokus pada partisipasi politik masyarakat.
9. Achlak Asmara Yasa (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula Di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)*”. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dalam melaksanakan pilkada serentak yang diselenggarakan pada tahun 2015 khususnya di Kabupaten Gowa, kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015. Persamaannya adalah partisipasi politik pada PILKADA. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus penelitiannya.

10. Wahyu Rama Dani (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 Di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Persamaannya pada penelitian ini yaitu partisipasi politik pemilih pemula. Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya yaitu partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu.
11. Mikael Persson (2013). Dalam penelitiannya yang berjudul “*Education and Politic Participation*”. Tujuan dalam penelitian ini menunjukkan sebagian besar studi perilaku politik ditemukan bahwa individu dengan pendidikan tinggi berpartisipasi dalam kegiatan politik yang lebih besar daripada individu dengan pendidikan rendah. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama terlibat dalam partisipasi politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pengaruh atas tingkat pendidikan individu terhadap partisipasi politik.
12. Barry C. Burden (2009). Dalam penelitiannya yang berjudul “*The Dynamic Effects Of Education On Voter Turnout*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan dinamis antara pendidikan formal dan jumlah pemilih selama setengah abad terakhir. Saya membingkai ulang teka-teki Brody tentang mengapa naiknya tingkat pendidikan tidak menghasilkan jumlah pemilih yang lebih tinggi menggunakan 'corong kausalitas' yang dipilih oleh Pemilih Amerika untuk memungkinkan hubungan yang dinamis antara

pendidikan dan partisipasi. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berpartisipasi politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pengaruh dinamis pendidikan terhadap jumlah pemilih.

13. Daniel Bochsler (2010). Dalam penelitiannya yang berjudul "*Can Internet Voting Increase Political Participation*". Tujuan penelitian ini adalah bahwa demokrasi elektronik akan meningkatkan partisipasi politik, dan termasuk kelompok yang sebelumnya tidak terwakili dalam politik. Untuk satu aspek dari e-demokrasi-pemilihan elektronik jarak jauh, ada sedikit bukti dunia nyata untuk memantau tren semacam itu. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berpartisipasi politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada voting internet meningkatkan partisipasi politik.
14. Nathan Manning (2014). Dalam penelitiannya yang berjudul "*Does Civic Education For Young People Increase Political Participation*". Tujuan penelitian ini adalah bahwa pengaruh pendidikan kewarganegaraan pada partisipasi politik normatif kaum muda. Pencarian elektronik ekstensif dilakukan untuk basis ilmu sosial dan pendidikan. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berpartisipasi politik pada kaum muda. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pengaruh pendidikan kewarganegaraan pada partisipasi politik normatif kaum muda.

15. Kevin Croke (2014). Dalam penelitiannya yang berjudul "*The Effect Of Education On Political Participation In Electoral Authoritarian Regimes: Evidence From Zimbabwe*". Penelitian ini bertujuan bahwa pendidikan meningkatkan partisipasi politik. Namun, hubungan ini mungkin tidak memiliki demokrasi maju dan konsolidasi. Dalam rejim otoriter elektoral, pemilih yang berpendidikan mungkin sengaja melepaskan diri. Jika pendidikan meningkatkan kapasitas kritis, kesadaran politik dan dukungan untuk demokrasi, warga negara yang berpendidikan mungkin percaya bahwa partisipasi itu sia-sia atau secara sah melegitimasi otokrat. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berpartisipasi politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus bahwa pendidikan meningkatkan partisipasi politik.
16. Guy Grossman (2016). Didalam penelitiannya yang berjudul "*Deliberate Disengagement: How Education Can Decrease Political Participation in Electoral Authoritarian Regimes*". Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan meningkatkan partisipasi politik. Namun, dalam rezim otoriter elektoral, para pemilih yang berpendidikan malah dapat dengan sengaja melepaskan diri. Jika pendidikan meningkatkan kapasitas kritis, kesadaran politik, dan dukungan untuk demokrasi, warga negara yang berpendidikan mungkin percaya bahwa partisipasi itu sia-sia. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berpartisipasi politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus bahwa pendidikan meningkatkan partisipasi politik.

17. Titus Pacho (2014). Dalam penelitiannya yang berjudul "*Necessity Of Political Education*". Tujuan penelitian ini adalah bahwa politik mengatur kehidupan kita di masyarakat dan memengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Ini mengatur apa yang bisa kita baca, katakan, dan tonton, beri tahu kita kapan dan bagaimana membayar pajak, dan mengatur segalanya mulai dari menggerakkan hak istimewa hingga aktivitas bisnis. Dengan kata lain, politik memimpin kita sastra dari lahir sampai mati. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama terlibat dalam pendidikan politik. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada kebutuhan pendidikan politik.
18. Dr. Ahmed M. Helal (2015). Dalam penelitiannya yang berjudul "*Political Efficacy, Voting Behavior and Partisanship among University Students*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara kemandirian politik, perilaku memilih dan keberpihakan di kalangan mahasiswa. 255 mahasiswa pascasarjana menjawab skala laporan diri yang menilai kemandirian politik, perilaku memilih dan keberpihakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara kemandirian politik, perilaku memilih, dan korelasi antara keberpihakan dan perilaku memilih. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kemandirian politik dan keberpihakan adalah prediksi kuat perilaku memilih. Akhirnya, tidak ada perbedaan gender dalam kemandirian politik, perilaku memilih dan keberpihakan. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama berkaitan dengan pemungutan suara. Sedangkan

perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada hubungan antara kemandirian politik, perilaku memilih dan keberpihakan di kalangan mahasiswa.

19. Reny Triwardani (2015). Dalam penelitiannya yang berjudul *“Reception Analysis of Beginner Voter toward the Political Party Advertising of the Winning in the Election 2014 ”*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama memberikan pendidikan politik untuk pemilih pemula. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek penelitian.

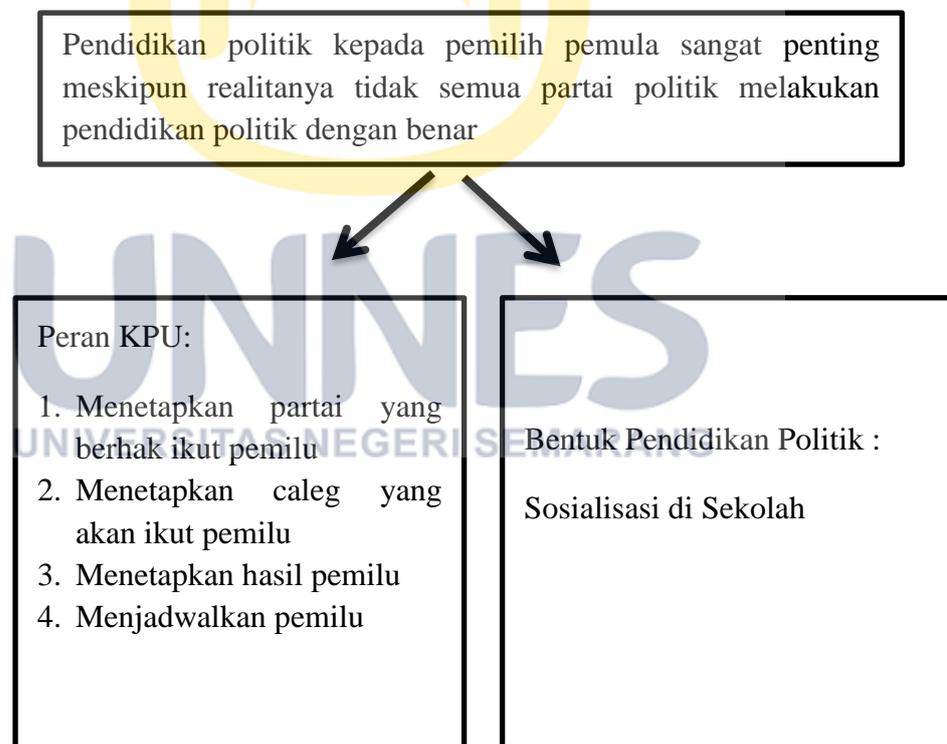
20. Sanyarat Meesuwani (2016). Dalam penelitiannya yang berjudul *“The Effect of Internet Use on Political Participation: Could the Internet Increase Political Participation in Thailand?”*. Penelitian ini bertujuan bahwa penggunaan Internet akan meningkatkan partisipasi politik di Thailand. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan partisipasi politik. Untuk perbedaannya, fokus penelitian ini terletak pada penggunaan internet.

G. Kerangka Berpikir

Pendidikan politik atau sosialisasi politik merupakan sebuah kebutuhan bagi para pemilih. Pendidikan politik kepada pemilih pemula sangat penting meskipun realitanya tidak semua partai politik melakukan pendidikan politik dengan benar.

Faulks mengemukakan teori elitisme demokrasi bahwa pemimpin yang berwawasan, yang mendapatkan persetujuan melalui partisipasi minimal massa, merupakan cara terbaik untuk memelihara ketertiban. KPU Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan Pilkada memberikan bentuk-bentuk pendidikan politik berupa sosialisasi supaya masyarakat khususnya pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam Pilkada.

Kerangka berpikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:





UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, maka tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya dapat dijawab dan disimpulkan, bahwa :

1. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal

Peran KPU Kabupaten Kendal dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Kendal terlaksana.

2. Bentuk Pendidikan Politik

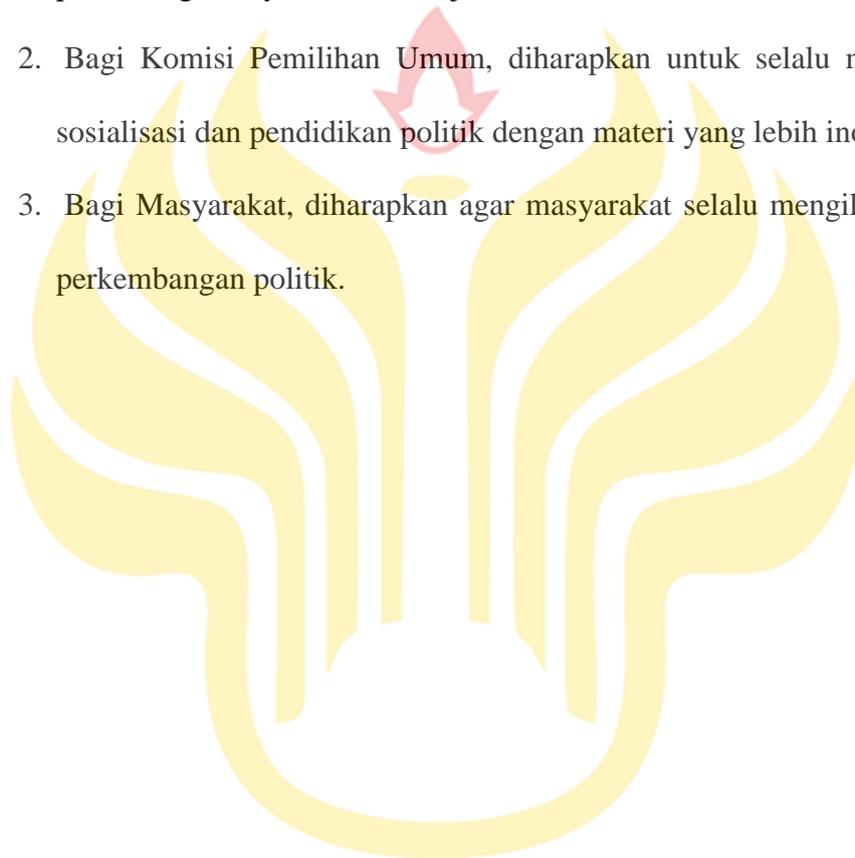
KPU Kabupaten Kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah – sekolah.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan pengkajian tentang peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Kendal.

Peneliti memberikan saran-saran untuk menambah wawasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas sejak dini.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum, diharapkan untuk selalu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik dengan materi yang lebih inovatif.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan agar masyarakat selalu mengikuti isu dan perkembangan politik.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfian. 1978. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Handoyo, Eko. Martien, Herna S, dan Aris, Munandar. 2016. *Etika Politik*. Semarang: Widya Karya
- Handoyo, Eko. Puji, Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2014. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA

Jurnal dan Artikel:

- Muhammad Eky Malindo Putra. 2015. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bintan tahun 2010*. E-journal
- Maria Desti Rita. 2016. *Peranan KPU dalam Sosialisasi Pemilukada kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Kultur Demokrasi
- Muhamm D Fatkhul D. 2013. *Peranan KPU Kabpaten Sleman dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Sleman Tahun 2012-2013*. E-Journal
- Mikael Pesson. 2013. *Education and Politic Participation*. Jurnal Cambridge University Press

Internet :

<http://www.lampost.co/berita-partisipasi-politik-pemilih-pemula-pada-pilkada-serentak>)

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/04/05/pendidikan-pemilih-muda-demi-pemilu-berkualitas-422405>)

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2018/01/29/44401/rugi-jika-kaum-terdidik-buta-politik>)

http://www.academia.edu/4728328/Teori-Teori_Politik)

<http://digilib.unila.ac.id/3593/>

<https://eprints.uny.ac.id/22875/>

<http://repositori.uinalauddin.ac.id/3741/1/MUH.%20IMAM%20ADIL%20AQIL.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/114746-ID-partisipasi-pemilih-pemula-pada-pemiliha.pdf>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9haaD->

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9haaD-6TfAhXKR08KHZrUA38QFjAJegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsrat>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9haaD-.ac.id%2Findex.php%2Fjurnaleksekutif%2Farticle%2Fdownload%2F7589%2F7147&usg=AOvVaw3RFuce8SZk0EMZcdPdKDHU>

<https://media.neliti.com/media/publications/108550-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pem.pdf>

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9095/1/Ahclak%20Asmara%20Yasa.pdf>

<https://lib.unnes.ac.id/3033/>

<https://www.eui.eu/Projects/EuDO-PublicOpinion/Documents/bochslere-voteeui2010.pdf>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379409000626>

<https://www.eui.eu/Projects/EuDO-PublicOpinion/Documents/bochslere-voteeui2010.pdf>

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00131911.2013.763767>

http://scholar.harvard.edu/files/jmarshall/files/zimbabwe_education_paper_v8_0.pdf

<https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/deliberate-disengagement-how-education-can-decrease-political-participation-in-electoral-authoritarian-regimes/192AB48618B0E0450C93E97BE8321218>

https://www.researchgate.net/publication/305319858_The_Effect_of_Internet_Use_on_Political_Participation_Could_the_Internet_Increase_Political_Participation_in_Thailand

https://www.researchgate.net/publication/280134321_Necessity_Of_Political_Education

<https://www.semanticscholar.org/paper/Political-Efficacy-%2C-Voting-Behavior-and-among-Helal-Hamza/7dd1d31df3200ee39bdf18567104ebe28e89292f>

<https://jspp.psychopen.eu/article/view/280>

<http://jateng.tribunnews.com/2016/03/29/evaluasi-pilkada-kpu-kendal-dinilai-belum-maksimal-gandeng-pemilih-pemula>



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG